

## LEGASLISASI PORKAS DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT PADA TAHUN 1985-1987

**Wahyu Lumaksono**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya  
E-mail: [chan2\\_yu2@yahoo.com](mailto:chan2_yu2@yahoo.com)

**Anik Andayani**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Surabaya

### Abstrak

Pada masa pemerintahan Indonesia terutama pada tahun era 1960an merupakan masa-masa yang begitu sulit bagi masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia pada saat itu masih berada dalam proses transisi kemerdekaan dan polemik permasalahan internal pemerintahan. Kendati masa itu adalah masa bagi bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan, namun tetap saja masyarakat masih belum bisa lepas dari permasalahan baik ekonomi, sosial, politik. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia pada masa itu masih rendah dalam sumber daya manusia yang dimiliki. Sehingga tidak jarang masyarakat Indonesia ini memilih jalan pintas tidak lain karena tuntutan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karenanya pada masa – masa itu model perjudian baik yang legal maupun ilegal serta undian berhadiah sangat diminati dan mendapatkan antusias yang luar biasa. Model perjudian di Indonesia yang pernah dilegalkan adalah model Lotre Buntut, Lotre Toto Raga, Lotre Toto dan Nasional Lotre, dan Lotre Totalisator. Kemudian setelah mendapat tentangan dari banyak pihak model perjudian dihapus melalui UU No 7 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1981. Setelah itu dimunculkan kembali dengan model undian berhadiah mulai dari SSB, Porkas, KSOB, SDSB.

**Kata kunci:** Porkas, Lotre, Legalisasi Judi

### Abstract

*At 1960th the era in Indonesian Governance, it was a crisis time to Indonesian People. The happens of this situation because the Indonesian People still at transition process of new triumph and polemic of governance internal problems. Although this problem was triumphs of Indonesian people from the colonization, but the people at this time still couldn't out from the economical, society, and pilitical problems. Most of Indonesian People was low in ability. So that, the Indonesian People at this time often choose faster way because economical demand to answering about daily needs. It because the legal or illegal gambling and the lotre at this time was very popular. The gambling models in Indonesia that ever get a legalization is "Lotre Buntut", "Lotre Toto Raga", "Lotre Toto", "National Lotre", and "Lotre Totalisator". And then, after has carped from many people, the gambling model has closed by "UU No 7 Tahun 1974" and "PP No 9 Tahun 1981". After this, there is happened again with price lotre consist of "SSB", "PORKAS", "KSOB", "SDSB".*

**Keywords:** Porkas, Lotre, Gambling Legalization

### A. Pendahuluan

Perjudian di Indonesia mempunyai latar belakang sejarah panjang, setidaknya telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Perjudian berkembang tidak hanya sebagai sebuah sarana hiburan semata tetapi juga sebagai sebuah alat yang mampu menyatukan berbagai kalangan. Pada umumnya, dahulu perjudian dikaitkan dengan dunia malam dan hiburan. Di zaman kolonial Belanda, judi berlangsung dengan sebuah *ordonansi* atau peraturan

yang dikeluarkan residen setempat<sup>1</sup>. Jadi meskipun perjudian pada dasarnya dianggap sebagai sesuatu yang tabu tapi lama kelamaan mulai muncul legitimasinya.

Judi dalam bentuk lotre sudah ada sejak tahun 1960-an yang zaman itu lebih dikenal dengan nama lotre buntut. Pada masa itu, di Bandung ada lotre yang disebut

1. Dalam Lembaran Negara Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526 menyebutkan bahwa : diperbolehkannya untuk mengeluarkan ordonansi tentang penertiban segala bentuk perjudian agar dilokalisasi

Toto Raga sebagai upaya pengumpulan dana mengikuti pacuan kuda. Memang perjudian dalam proses sejarahnya ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha – usaha pembangunan. Ini terlihat di Jakarta semasa Gubernur Ali Sadikin muncul undian lotre yang diberi nama Toto dan Nalo (Nasional Lotre) kemudian yang terlokalisasi dalam bentuk kasino<sup>2</sup>. Bentuk – bentuk perjudian seperti lotre juga berkembang pesat di berbagai wilayah Indonesia dan dianggap sebagai sebuah permainan yang tidak mengenal kelas sosial diantara masyarakat umum.

Perjudian bukan merupakan masalah baru yang terjadi di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa sejak zaman dahulu kegiatan judi merupakan aktivitas sosial mayoritas masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah. Hingga pada zaman orde baru mulai muncul gagasan untuk menertibkan aktivitas yang mulai meresahkan masyarakat ini. Departemen sosial waktu itu melakukan upaya untuk mempelajari cara untuk memfasilitasi aktivitas tersebut secara tertib. Tahun 1974 – 1976 pemerintah melakukan studi banding di Inggris untuk mencermati tentang pelaksanaan model perjudian dalam bentuk undian yang dinamakan *forecast*<sup>3</sup>. Dengan berbagai pertimbangan dari Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Inteljen Negara (BAKIN), dan Departemen Sosial, Kupon Porkas Sepak Bola diresmikan, peredaran, dan penjualan pada 28 Desember 1985<sup>4</sup>. Hingga pada akhirnya Porkas berubah nama menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) dan bersifat lebih realistis pada tahun 1987<sup>5</sup>.

Tidak hanya dalam hal pelegalan kebijakan dalam unsur perjudian ataupun undian. Pemerintah juga melakukan upaya untuk menekan aktivitas yang merusak moral serta mental masyarakat Indonesia. Munculnya Undang – Undang Nomor 7 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1981 adalah wujud pemerintah yang peduli terhadap keberlangsungan masa depan bangsa. Hal itu juga di dasari dahulu dengan berbagai reaksi beberapa pihak yang tidak menginginkan kebijakan – kebijakan mengenai perjudian dan undian diterapkan.

Pemasukan pajak yang berasal dari judi ini memang selalu menjadi persoalan yang tidak pernah hilang. Faktor potensial yang sangat menarik ini membuat sikap

pemerintah juga seolah – olah tidak bisa bersikap tegas dalam memberantas persoalan perjudian. Begitu besarnya uang yang dihasilkan ini sejatinya dapat membantu pemerintah dalam mengatasi kendala pembiayaan. Namun sekali lagi persoalan perjudian selalu memunculkan dua pendapat<sup>6</sup>. Pertama, judi itu sesuai dengan ajaran agama haram hukumnya dan tidak diperbolehkan. Kedua, malah berpendapat semua harus disikapi realistis. Jika judi tidak dilokalisasi, maka hanya mereka pemilik senjata dan modal nekat saja yang akan mengambil untung miliaran rupiah dari perputaran uang di atas meja judi<sup>7</sup>. Dikarenakan judi sudah berkembang di masyarakat dan memang perlu untuk dilokalisasi.

Permasalahan di atas menarik untuk dianalisis karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga masyarakat Islam tidak terjebak dalam kegiatan-kegiatan yang sepiantas untuk amal kebaikan akan tetapi bermuatan judi yang justru dilarang oleh Islam. Fenomena judi ini berkembang selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun bersama masyarakat dengan segala bentuk dinamikanya. Model perjudian merupakan sebuah fenomena yang menarik mengikuti perkembangan sosial – ekonomi di kota – kota besar Indonesia. Oleh karenanya, sesuai dengan latar belakang diatas maka dicari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan untuk menjadi sebuah karya penulisan yang komprehensif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deskriptif analitis dimana dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan hubungan atau sebuah kondisi yang sedang berlaku, proses, pendapat dan dampak yang ditimbulkan. Adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam metode sejarah meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi<sup>8</sup>.

Tahapan awal penelitian untuk menganalisis topik tulisan adalah tahap heuristik yaitu mengumpulkan sumber dan data sejarah berupa buku-buku yang membahas tentang lotre, model undian berhadiah maupun buku yang membahas polemik pemerintahan orde baru. Selain buku, penulis juga mendapatkan artikel majalah yang sejaman dengan pelegalan kebijakan undian berhadiah. Semua sumber yang didapat berasal dari Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Medayu Agung dan beberapa tempat lainnya.

Kemudian dilakukan kritik, baik ekstern maupun intern. Kritik ekstern, penulis melakukan validitas

<sup>2</sup> K.H., Ramadhan. 1995. *Pers Bertanya “Bang Ali Menjawab”*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya. Halaman 7-11

<sup>3</sup> Pos Kota, 20 Januari 1986

<sup>4</sup> Kompas, 28 Desember 1985. “Hari ini KBPS Resmi Beredar”

<sup>5</sup> Tempo, 28 November 1987

<sup>6</sup> B. Simandjuntak. 1990. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito. Halaman 65

<sup>7</sup> K.H., Ramadhan, *op. cit.*, Halaman 24

<sup>8</sup> Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA Unipress. halaman 10-11

sumber. Apakah sumber tersebut otentik, relevan, atau sebaliknya. Selanjutnya kritik intern, melakukan pengujian terhadap isi sumber tersebut. Kritik ini lebih pada menganalisis sumber secara satu persatu secara langsung, dengan tujuan mendapatkan data yang lebih akurat, dan sesuai dengan tema penulis. Kemudian penulis melakukan penafsiran sumber atau data yang telah menjadi fakta tersebut. Penulis juga mencari keterkaitan antar sumber yang akan diteliti, apakah sumber tersebut dapat menjadi sumber pendukung dengan sumber-sumber lainnya. Langkah terakhir adalah tahap historiografi yaitu fakta yang telah ditafsirkan disajikan dalam bentuk penulisan jurnal ilmiah.

## B. Hasil Dan Pembahasan

Pada masa pendudukan Jepang perkembangan seni sandiwarra menjadi sangat berkembang dan hidup kembali. Hal ini dikarenakan sikap Jepang yang anti kebudayaan Barat, sehingga pemutaran film-film yang sebagian besar berasal dari Barat dilarang keras. Pada bulan Agustus Jepang membentuk departemen yang bertanggung jawab di bidang propaganda serta informasi yang menyangkut pemerintahan sipil yang disebut dengan nama Sendenbu (Departemen Propaganda). Departemen ini dibentuk di dalam badan militer (Gunseikan). Departemen ini sejak awal pemerintahan Jepang sampai akhir pemerintahan Jepang di Indonesia selalu dipimpin oleh kalangan militer Jepang.

Jepang menyadari bahwa teater Indonesia masih belum berkembang, pertama-tama berusaha meningkatkan kualitasnya dan mengubah gambaran yang ada mengenai "sandiwarra". Sandiwarra tidak begitu diperhatikan oleh kalangan terpelajar, yang menganggapnya kurang berharga dan kurang terpelajar. Ada beberapa organisasi yang dibentuk Jepang melalui Sendenbu dalam menangani aktifitas sandiwarra diantaranya Sekolah Tonil, Jawa Engeki Kyokai atau "Perserikatan Oesaha Sandiwarra Djawa (P.O.S.D), dan Keimin Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan.

### 1. Perjudian Di Indonesia

Model perjudian dalam bentuk lotere sudah ada sejak lama, bahkan model lotere tersebut secara teknis berada dibawah pelaksanaan Yayasan yang berwenang yang telah ditunjuk sebagai penanggungjawab. Diawali dengan Lotere Dana Harapan disebut juga Undian Harapan dikelola oleh pemerintah pusat dan berada di bawah Yayasan Rehabilitasi Sosial yang berubah nama tahun 1978 menjadi Badan Usaha Undian Harapan<sup>9</sup>. Hasil penarikan Lotere undian Harapan digunakan untuk

membiayai penanggulangan masalah sosial. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang tertera pada Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomer: B.A. 5-4-76/169 tentang penyelenggaraan undian harapan. Dana Harapan kemudian ditutup karena protes dari masyarakat dan tidak mampu menggalang dana lebih untuk kepentingan sosial, kemudian diganti dengan SSB.

SSB ( Sumbangan Sosial Berhadiah) dikeluarkan sebagai pengganti undian harapan yang telah dibekukan pada tahun 1978 karena menimbulkan kontroversi dan mengundang reaksi protes dari masyarakat. Pemerintah kemudian membuat kebijakan baru dengan mengeluarkan SSB yang ditengarai sebagai ajakan judi terselubung dengan menyamarkan namanya. Sosialisasi kebijakan tersebut oleh pemerintah dijelaskan bukan sebagai judi melainkan bentuk sumbangan. Kupon SSB sendiri disebut dengan Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah (TSSB) atau disebut juga KSSB (Kupon Sumbangan Sosial Berhadiah). SSB mulai diberlakukan di tahun 1979 dan dicetak sebanyak 4 juta lembar, diundi setiap dua minggu sekali. Pengelolaan SSB diserahkan pada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) yang berpusat di Jakarta<sup>10</sup>.

Kebijakan TSSB diberlakukan selama kurun waktu 9 tahun, terhitung sejak awal diedarkan yaitu tahun 1979 hingga dibekukan dan diganti menjadi SDSB di penghujung tahun 1988. Peredaran TSSB juga diikuti dengan diedarkannya porkas sampai porkas bertransformasi menjadi KSOB. Omzet yang didapatkan dari TSSB per tahun diperkirakan menembus angka 1 trilyun rupiah. Dana yang diperoleh dari penarikan TSSB didistribusikan salah satunya untuk bantuan sosial. Hingga tahun 1985 tercatat 2,59 milyar dana yang diperoleh YDBKS dari TSSB didistribusikan untuk keperluan sosial dan kemanusiaan. TSSB yang berhasil dijual hingga tahun 1985 sebanyak 4 juta lembar. Penyaluran hasil TSSB senilai 2,95 milyar tersebut diantaranya untuk sumbangan pendidikan dan kebudayaan, agama dan kerohanian, kesehatan masyarakat, kegiatan masyarakat, pantiwreda dan alokasi kegiatan sosial lainnya<sup>11</sup>. Di tahun 1988, TSSB bersama KSOB ditengarai menyedot dana rakyat hingga 962,4 milyar Rupiah. Dana tersebut sebagian besar dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk hadiah serta honor bagi para agen dan pengecer, kemudian sisanya digunakan Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial untuk kepentingan sosial dan olahraga<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Tempo, 12 Januari 2004. "Dari Lotere ke Lotere"

<sup>10</sup> Tempo, 20 November 1993. "Wajah Lotere Silih Berganti". Lihat juga lampiran iklan SSB tahun 1979, *Kedaulatan Rakyat*, 8 Febuari 1979.

<sup>11</sup> Kedaulatan Rakyat, 27 Maret 1986.

<sup>12</sup> Kompas, 13 Juli 1988.



Porkas, berasal dari kata *Forecast* merupakan sarana untuk mengumpulkan dana untuk olahraga yang mulai dikenal pada awal tahun 1986<sup>13</sup>. Berawal dari studi banding yang dilakukan Depsos selama dua tahun di Inggris, penyelenggaraan *forecast* Inggris dilaksanakan dengan bentuk sederhana dan tidak menimbulkan eksesi judi. Berangkat dari hal tersebut, pemerintah mencoba untuk mengaplikasikannya di Indonesia<sup>14</sup>. *Forecast* di Indonesia yang dikeluarkan izinnya oleh departemen sosial kemudian disebut Porkas Sepak Bola. Porkas merupakan akronim dari *Pekan Olah Raga dan Ketangkasan*.

Pengadaan Porkas Sepakbola mengacu pada UU no. 2 Tahun 1954 tentang undian. Kemudian diperkuat dengan SK menteri Sosial No BSS-10-12/85 tanggal 10 Desember 1985. Walaupun kebijakan telah dikeluarkan pada akhir Desember 1985, Porkas baru secara resmi diberlakukan mulai tahun 1986<sup>15</sup>. Banyak yang menyangkal bahwa Porkas bukan merupakan bentuk perjudian, tetapi banyak juga yang berpendapat bahwa Porkas merupakan judi. Mereka yang menganggap Porkas bukan tergolong judi mempunyai alasan bahwa jika menebak porkas tidak sembarangan, tetapi harus ada logika dan materi yang dianalisis<sup>16</sup>. Abdul Gafur selaku menpora pada waktu itu juga menyatakan bahwa porkas sepakbola merupakan sebuah permainan dan bukan merupakan judi. Beliau juga menegaskan bahwa sebelum kebijakan porkas diberlakukan, pemerintah mengadakan penelitian cukup lama dan komprehensif, sehingga keputusan berlakunya porkas bukan keputusan yang sembarang diambil<sup>17</sup>. Sebetulnya lotere Porkas hampir mirip dengan lotere atau toto yang ada di Spanyol pada tahun 1985, yaitu menebak hasil pertandingan sepakbola atas 14 klub profesional yang masuk di divisi utama di negeri tersebut. Peluang kemungkinan menang porkas adalah 1:10 juta, yang artinya seorang pembeli kupon harus membeli 10 juta kupon dan diisi dengan 10 juta kemungkinan untuk mendapatkan hadiah utama. Ini menjadikan porkas sangat sulit untuk ditebak, karena menurut Ahmed Soerawidjaja sebagai staf ahli dalam kementerian sosial pada waktu itu menjelaskan bahwa tujuan utama Porkas yaitu mencari dana untuk pembinaan

olahraga, jadi permainan porkas dibuat agak sulit dalam sistem menebaknya agar tidak mudah bangkrut<sup>18</sup>.

Porkas kemudian bertransformasi menjadi KSOB tahun 1987. Pelaksanaan KSOB mengacu pada SK Menteri Sosial nomor 29/BSS 1987. Keberadaan KSOB sama halnya dengan Porkas, hanya berlangsung singkat. KSOB dan TSSB kemudian digantikan oleh SDSB. Implementasi SDSB didasari oleh Keputusan Menteri Sosial RI No. 21 / BSS / XII / 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah serta Keputusan Menteri Sosial RI No. BSS 16 - 11 / 88 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta<sup>19</sup>. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/BSS/XII/1988 tentang ketentuan pencedaran SDSB.

## 2. Proses Dan Dampak Lahirnya Porkas

Memasuki perjuangan kemerdekaan, judi dan aktivitas haram lainnya sempat menjadi aktivitas underground sumber dana revolusi. Belakangan di era 1960, judi dalam modus lotre atau lotre buntut umum ditemukan sebagai kegiatan harian. Kegiatan ini sempat berhenti di tahun 1965 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Keppres No 113 Tahun 1965 yang menyatakan lotre buntut bersama musik ngak-ngik ngok merusak moral bangsa dan masuk dalam kategori subversi<sup>20</sup>.

Sejarah mengatakan tak beberapa lama setelah Presiden Soekarno mengesahkan aturan tersebut. Soekarno terkena dampak dari segala kebijakan yang Beliau putuskan, hal tersebut sampai sekarang diyakini dilakukan oleh segerombolan komunis yang merencanakan kejatuhan Presiden Soekarno. Akhirnya Presiden Soekarno waktu itu turun dari kursi pemerintahan, kemudian Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI<sup>21</sup>. Jargon membangun bangsa dan ajakan bersatu padu

<sup>18</sup> Tempo, 11 Januari 1986 : 12, "Bagaimana Cara Memenangkan Undian Porkas?"

<sup>19</sup> Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 295 / KPTS / 1988 Tentang Penetapan Wilayah Administrasi Peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

<sup>20</sup> Denny J.A., 1989. *Menegakkan Demokrasi : Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda mengenai Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Studi Indonesia. Hlm 31

<sup>21</sup> Sunardian Wirodono. 1994. *Gerakan Politik Indonesia : catatan 1993*. Jakarta : Puspa Swara. Hlm 37

<sup>13</sup> Tempo, 20 Juni 1987. "Porkas : Dana, Dukun & Duka"

<sup>14</sup> Suara Merdeka. 19 Januari 2004

<sup>15</sup> Kedaulatan Rakyat, 22 Juli 1986

<sup>16</sup> Kedaulatan Rakyat. 8 September 1987. "Selamat Panjang Umur Porkas"

<sup>17</sup> Bernas, 26 Maret 1986. "Porkas dan Forecasting"

mengganyang kekuatan komunis semakin menggelora. Satu cara untuk mempersatukan masyarakat yang tepat setelah mengalami perjalanan politik yang cukup menegangkan adalah dengan mengadakan PON VII yang akan diselenggarakan di Surabaya tahun 1969. Ini merupakan sebuah langkah atau upaya bagi pemerintah untuk memberikan sebuah aktivitas bagi masyarakat menengah kebawah agar dapat menekan ketegangan politik waktu itu berlangsung lama.

Namun saat itu penyelenggaraan kegiatan PON VII mengalami kendala berkaitan dengan dana pemerintah sangat minim. Bahkan hutang peninggalan pasca Presiden Soekarno turun dari jabatannya masih banyak. Sehingga saat itu muncul sebuah ide atau gagasan sebagai satu-satunya solusi untuk mendapatkan uang dalam bentuk besar adalah dengan judi. Maka di tahun 1968, Pemda Surabaya mengeluarkan Lotto (Lotre Totalisator) PON Surya yang bertujuan untuk menghimpun dana bagi PON VII yang akan diselenggarakan pada tahun 1969. Hasilnya pun sukses, dana untuk penyelenggaraan terkumpul dan PON VII berhasil diselenggarakan<sup>22</sup>.

Pola judi sebagai alat pengumpul uang kemudian ditiru Gubernur Ali Sadikin dengan melegalkan judi. Dia juga berhasil memaksa pemerintah mengeluarkan landasan legal hukum melalui Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1954 yang memungkinkan pemerintah daerah memungut pajak atas izin perjudian. Sebenarnya gagasan untuk melegalkan judi di Jakarta sudah diawali oleh Dr. Sumarno Sosroatmodjo yang merupakan Gubernur sebelum Ali Sadikin. Tetapi keinginan Gubernur Dr. Surmarno untuk melegalkan judi *casino* tidak terlaksana akibat keraguan beliau untuk menentang Presiden Soekarno yang pada waktu itu tidak setuju apabila judi dilegalkan.

Kebijakan tersebut memang dirasa sangatlah penting demi tujuan pembangunan Jakarta yang lebih baik, maka Gubernur Ali Sadikin memberanikan diri untuk membuat kebijakan pelegalan judi. Sebab, berdasarkan UU Nomor 11 tahun 1957 telah memberikan dasar kekuasaan yang kuat kepada kepala daerah untuk bertanggungjawab atas daerah yang dipimpinnya. Sehingga Ali Sadikin dalam mengesahkan judi tersebut tanpa meminta persetujuan dari Menteri Sosial dan DPRD DKI Jakarta. Beliau hanya menemui Presiden Soeharto dan melaporkan bahwa Jakarta akan membuat sebuah lokalisasi perjudian

berdasarkan Undang – Undang<sup>23</sup>. Untuk pelaksanaan kebijakan ini sendiri bukan tanpa halangan. Sejumlah tokoh agama dan masyarakat pada waktu itu juga menentang adanya aktivitas judi di Jakarta. Berangkat dari reaksi masyarakat yang kontra tersebut akhirnya Ali Sadikin disebut sebagai “Gubernur Judi” atau “Gubernur Maksiat”, bahkan sampai istrinya ada yang menyebut sebagai “*Madam Hwa – Hwe*”. Hasilnya memang sangat memuaskan, dari pajak judi akhirnya Ibu Kota DKI Jakarta yang kumuh disulap menjadi sebuah metropol yang bersih dan beradab untuk diwariskan bagi generasi saat ini.

Situasi politik pada masa pemerintahan Ali Sadikin sebagai Gubernur DKI Jakarta dibawah kekuasaan Presiden Soeharto memang banyak menuai berbagai kontroversi kebijakan. Ketika itu ada undian lotre bernama Toto dan Nalo (Nasional Lotre) di tahun 1971. Selain Toto dan Nalo ada Lotto KONI keduanya eksis hingga enam tahun lamanya atau 1974 usai Peristiwa 15 Januari 1974 tentang penertiban perjudian bahwa segala bentuk tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dipercaya pelarangan itu terkait menjelang peluncuran aturan Fungsi Partai Politik tahun 1975 untuk menyongsong Pemilu 1977 yang menjadi awal ditahbiskannya Golkar sebagai pemenang pemilu hingga 30 tahun kemudian, sebab di tahun 1976 bersamaan dengan kampanye integrasi Timor-Timur.

Ketegangan politik pada waktu itu mungkin yang menyebabkan judi di Jakarta juga dilarang agar Presiden Soeharto dapat menekan popularitas dari Gubernur DKI Jakarta yang dianggap oleh berbagai pihak sukses membangun Jakarta sebagai kota yang indah. Sehingga presiden Soeharto merasa terancam posisinya untuk melanjutkan kembali kursi jabatan presiden RI, ditambah adanya kasus petisi 50 yang semakin memberatkan keberadaan Ali Sadikin. Hal tersebut dianggap sebagai nilai minus yang dapat mengurangi pencitraan Ali Sadikin di mata masyarakat luas. Pemerintah orde baru yang mencium adanya kejadian tersebut lantas membuat berbagai kebijakan yang semakin menyudutkan pemerintahan Gubernur Ali Sadikin.

Sebenarnya pemerintah Soeharto juga mempunyai keinginan untuk menerapkan model undian berhadiah yang tanpa memiliki unsur judi sebagai upaya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Sehingga presiden Soeharto sedang menugaskan Menteri Sosial Mintaredja pada waktu itu untuk segera menyelenggarakan undian

<sup>22</sup> Franz Magnis Suseno. 1998. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: PT. Kanisius. Halaman 25-27.

<sup>23</sup> K.H., Ramadhan. 2012. *Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota Manusiawi*. Jakarta: PT. Ufuk Publishing House. Hlm 46

berhadiah<sup>24</sup>. Untuk menciptakan model undian berhadiah yang tidak berbau judi, maka Mensos sekaligus tokoh Partai Persatuan Pembangunan tersebut melakukan studi banding ke Inggris. Studi itu menghasilkan gagasan menyelenggarakan forecast sebagai bentuk undian tanpa menimbulkan eksese judi. Sekaligus bagi hasil yang diperoleh antara penyelenggara tebakkan, pemerintah, dan hadiah bagi si penebak yang komposisinya diusulkan 40-40-20. Belakangan rencana ini gagal karena Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) dan Departemen Dalam Negeri meminta Depsos menunda dulu rencana itu sekaligus ada revisi pembagian hasil menjadi 50-30-20.

Sejak awal rencana legalisasi porkas mendapat reaksi kontra dari banyak pihak. Ditambah pada masa itu juga terhambat dengan kondisi dalam negeri yang tidak kondusif di awal 1980-an. Perlu diingat peristiwa pembajakan Garuda Woyla oleh sekelompok teroris pada April 1981 di Don Muang negara Thailand. Begitu banyaknya penjahat yang sedang merajalela di Nusantara hingga harus disikapi dengan aksi tembakan oleh operasi Petrus menjelang Pemilu 1982<sup>25</sup>. Beberapa peristiwa yang mengiringi proses berdirinya kebijakan untuk melegalkan undian berhadiah porkas ini menjadi sebuah kronologi panjang yang mewarnai dinamika perjudian di tanah air.

Dengan berbagai dinamika politik dan sosial pada waktu itu tanggal 28 Desember 1985, Kupon Berhadiah Porkas Sepak Bola diresmikan, diedarkan, dan dijual<sup>26</sup>. Dengan tujuan berdirinya porkas yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk menghimpun dana masyarakat untuk menunjang pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga Indonesia. Porkas lahir berdasarkan UU No 22 Tahun 1954 tentang Undian, yang antara lain bertujuan agar undian yang menghasilkan hadiah tidak menimbulkan berbagai keburukan sosial. Berbeda dari Toto KONI, Porkas tidak ada tebakkan angka, melainkan penebakan M-S-K atau menang, seri, dan kalah. Perbedaan lain, kalau Toto KONI beredar sampai ke pelosok daerah, maka Porkas beredar hanya sampai tingkat kabupaten dan anak-anak di bawah usia 17 tahun dilarang menjual, mengedarkan, serta membelinya. Kupon Porkas ini terdiri atas 14 kolom dan diundi seminggu sekali, setelah 14 grup sepak bola melakukan 14 kali pertandingan. Jadwal pertandingan ditentukan oleh PSSI dari jadwal di dalam dan luar negeri.

Meski pelaksanaan undian Porkas mendapatkan banyak manfaat menurut sebagian pihak. Hal tersebut tidak membuat sebagian pihak lain yang selalu menentang kebijakan tersebut untuk diam tanpa tindakan. Sejak awal tahun 1986 sudah menjadi banyak pembicaraan serta pembahasan bahwa apakah undian Porkas ini termasuk unsur judi atau bukan. Sebagai tindakan reaksi pihak yang menentang undian tersebut, maka pertengahan tahun 1986 Majelis Ulama Indonesia yang dikenal dengan MUI menulis surat dan dilayangkan kepada pemerintah untuk meminta agar pelaksanaan undian Porkas dapat di evaluasi kembali. Tidak hanya upaya dari MUI saja, Ketua DPRD Jawa Timur Blegoh Sumarto yang merasa cemas melihat undian Porkas memasuki semua lapisan dari atas sampai rakyat kecil juga menginginkan untuk mengevaluasi pelaksanaan undian Porkas agar tidak menyebabkan kerusakan mental para remaja dan masyarakat. Ditambah pendapat dari seorang ekonom dari Universitas Indonesia Iwan Jaya Aziz menyimpulkan bahwa dari sudut mana pun undian Porkas tidak baik untuk keberlangsungan bangsa Indonesia.

Disebabkan banyaknya gelombang protes yang bertubi-tubi, akhir tahun 1987, Porkas berubah nama menjadi Kupon Sumbangan Olahraga Berhadiah (KSOB) dan bersifat lebih realistis<sup>27</sup>. Kupon undian ini dijual Rp 600/lembar dengan hadiah utama Rp 8 juta. Dalam KSOB ada dua macam kupon, kupon berisi tebakkan sepak bola. Kali ini yang ditebak pada kupon tidak lagi menang-seri-kalah seperti pada Porkas, tetapi juga skor pertandingan, bahkan skor babak pertama dan babak kedua. Kupon KSOB kedua berisi tebakkan sepak bola dan tebakkan huruf. Dalam kurun waktu Januari-Desember 1987, undian ini menyedot dana masyarakat sampai Rp 221,2 miliar. Pertengahan tahun 1988, Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi Persatuan Pembangunan menyatakan, SOB dan TSSB (Tanda Sumbangan Sosial Berhadiah) menimbulkan akibat negatif. Yakni, tersedotnya dana masyarakat pedesaan dan akan memengaruhi kehidupan perekonomian daerah.

Perjudian dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh oleh pemerintah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, sebagai contoh, di DKI Jakarta semasa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin yang melegalkan perjudian dan prostitusi. Namun, terlepas dari itu eksese negatif dari perjudian lebih besar daripada eksese positif<sup>28</sup>. Oleh karena itu pemerintah dan aparat hukum terkait harus

<sup>24</sup> Kartono, Kartini. 1983. *Patologi Sosial*. Edisi Terbaru. Jakarta: CV Rajawali. Hlm 19

<sup>25</sup> Sunardian Wirodono. 1994. *Gerakan Politik Indonesia : catatan 1993*. Jakarta : Puspa Swara. Hlm 45

<sup>26</sup> Kompas, 28 Desember 1985

<sup>27</sup> Tempo, 28 November 1987. "Menebak – nebak izin Porkas"

<sup>28</sup> K.H., Ramadhan. *Op. cit.* Hal 07



mengambil tindakan tegas agar masyarakat menjauhi dan akhirnya berhenti melakukan perjudian.

Banyak sekali efek yang ditimbulkan sebagai akibat dari sumbangan berhadiah mulai dari TSSB hingga SDSB, seperti yang dijumpai pada tahun 1986. Ketika kehadiran TSSB juga diramaikan dengan kehadiran Porkas. Pada awal beredarnya TSSB dan Porkas memang belum terlihat dampak negatif yang timbul terutama terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, dampak Porkas mulai dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Seperti yang pernah disindir dalam karikatur koran Berita nasional Yogyakarta, Petani menjadi malas dan tidak produktif. Setiap harinya hanya diisi dengan meramal kode Porkas untuk mencoba peruntungan mendapatkan hadiah undian<sup>29</sup>.

Keadaan semakin parah ketika lotere Porkas berubah wajah menjadi KSOB. Bersamaan dengan TSSB, kedua lotere tersebut mampu menyedot perhatian masyarakat khususnya golongan menengah bawah. Tidak hanya masyarakat miskin di desa - desa yang terhanyut irasionalitas iming - iming Lotere tersebut yang menjadikan kaya dalam sekejap, tetapi juga masyarakat marjinal di kota kota di Indonesia<sup>30</sup>. Keadaan semakin parah pada tahun 1988, ketika terjadi resesi ekonomi yang menyebabkan harga - harga kebutuhan pokok melambung, sebagian masyarakat yang gila lotere KSOB dan TSSB tidak peduli dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang kian susah. Mereka lebih mementingkan bagaimana cara memenangkan lotere tersebut, seolah tidak peduli terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Para penggila lotere tersebut terkadang membelanjakan hampir seluruh biaya hidupnya untuk kupon - kupon lotere yang belum pasti dapat mengentaskan dari kemiskinan.

Tidak hanya dampak ekonomi yang sangat besar dijumpai akibat peredaran lotere sumbangan berhadiah tersebut, tetapi juga tindak kriminalitas banyak ditemukan terutama saat lotere Porkas mulai marak di tahun 1987<sup>31</sup>. Tindak kriminalitas yang ditemukan salah satunya yaitu tindak penipuan yang dilakukan oleh mantan staf biro kepegawaian Setwilda DIY, Sugiarto. Dia menipu calon pegawai dengan iming - iming diterima kerja di Kepatihan. Secara tidak sengaja, korban penipuan tersebut memergoki tersangka ketika tengah membeli beberapa kupon Porkas. Korban kemudian melaporkan tindak penipuan tersebut kepada pihak berwajib. Tersangka menjalani masa hukuman selama tiga bulan. Tersangka mengakui perbuatannya karena

kecanduan kupon Porkas dan merasa yakin bahwa ia pasti beruntung dan bisa memenangkan undian lotere tersebut<sup>32</sup>.

Aksi protes juga terjadi saat SDSB digandrungi masyarakat, dan banyak korban dari masyarakat kecil. Kritisnya mahasiswa dalam menanggapi hal tersebut menyebabkan mereka turun untuk menentang SDSB. diawali dari penerimaan dana sumbangan dari YDBKS sebagai hasil SDSB untuk UII sebesar 100 juta rupiah untuk pembangunan sarana pendidikan di tahun 1991, mahasiswa UII melakukan aksi demonstrasi bulan agustus 1991. Mereka menuntut uang yang disumbangkan untuk UII agar dikembalikan kepada YDBKS<sup>33</sup>. Tanggal 5 November 1991, sejumlah 5000 mahasiswa melakukan unjukrasa anti SDSB. Aksi unjuk rasa digelar sejak pagi kemudian diselingi shalat Jumat berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan aksi jalan menuju Malioboro dan dilanjutkan menuju gedung DPRD DIY<sup>34</sup>.

Kemudian tanggal 13 November 1991, Terjadi aksi masa yang lebih besar. Mahasiswa dari beberapa universitas di yogyakarta di koordinir untuk melakukan aksi protes terhadap SDSB. Sebanyak 9000 mahasiswa dari UGM, UII, IAIN turun ke jalan melakukan aksi menentang SDSB. Aparat keamanan dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan aksi sebelumnya dikerahkan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan<sup>35</sup>.

Seiring dengan besarnya arus yang menginginkan penghapusan SDSB, pemerintah mulai berbenah dan membahas hal tersebut dalam rapat kerja komisi II dengan menteri sosial. Hal yang tidak sepenuhnya bisa diterima masyarakat adalah tidak adanya pertanggungjawaban yang terperinci serta transparan terhadap masyarakat mengenai penggunaan dana dari penarikan SDSB. Selain itu, lotere legal tersebut justru dikelola oleh yayasan swasta. Sebenarnya izin penyelenggaraan SDSB diperpanjang hingga tahun 1996, meniru suksesnya KSOB dan TSSB yang berhasil menyedot dana untuk kegiatan sosial. Namun pemerintah berinisiatif ingin mencabut izin pengoperasian SDSB pada tanggal 9 September 1993 akibat menuai gelombang protes semenjak tahun 1991. Diperparah dengan aksi massa yang membakar beberapa kios SDSB di wilayah DKI Jakarta. SDSB hanya mampu bertahan sejak Januari 1989 hingga akhir tahun 1993. Pada realisasinya, semua kupon SDSB baru dapat ditarik dari peredaran secara

<sup>29</sup> Bernas, 24 Maret 1986  
<sup>30</sup> Kedaulatan Rakyat, 10 Juli 1988  
<sup>31</sup> Kedaulatan Rakyat, 27 Maret 1987.

<sup>32</sup> Kedaulatan Rakyat, 11 Agustus 1987.

<sup>33</sup> Tempo, 20 November 1993. "Dana

Buat Siapa"

<sup>34</sup> Sunardian Wirodono. 1994. *Gerakan Politik Indonesia : catatan 1993*. Jakarta : Puspa Swara. Hlm 56

<sup>35</sup> Sunardian Wirodono. *Ibid*. Hlm 57

penyebab pada November 1993. Tanggal 24 November 1993, para agen yang tersebar di wilayah Indonesia sudah tidak lagi mengedarkan kupon SDSB. Esok harinya, menteri sosial Inten Soewono mengumumkan pembubaran SDSB atau dikenal dengan *Lotere Berhadiah Semiliar* di hadapan anggota DPR tanggal 25 November 1993. Hal ini sebagai jawaban atas ketidakpuasan serta desakan masyarakat untuk membekukan SDSB. Sejak saat itulah SDSB benar – benar hilang dari masyarakat.

Pelaksanaan undian berhadiah khususnya porkas ini berdampak terhadap aspek – aspek kehidupan yang bukan merupakan hal yang kecil. Kebijakan yang diberlakukan secara nasional ini yang diawal diharap mampu menyuntik pemasukan pemerintah yang diambil dari pajak undian tersebut malah berdampak negatif bagi masyarakat Indonesia. Beberapa realita yang menunjukkan kejadian – kejadian tersebut merupakan hal yang menjadi pertimbangan bahwa secara perhitungan ekonomi undian porkas perlu evaluasi.

### C. Penutup

#### Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan kiranya pada periode 1970an hingga tahun 1990an adalah masa masa dilematis yang dihadapi bangsa Indonesia. Perjudian terutama jenis lotere tumbuh subur melibatkan elemen stakeholder. Pemerintah pada awalnya hanya ingin menekan aliran dana ke luar negeri sebagai akibat dari suburnya perjudian di negeri Singapura dan Malaysia.

Melihat dampak perjudian lotere yang sangat besar terhadap masyarakat, pemerintah melarang segala jenis perjudian dan lotere dengan mengeluarkan Kepres RI No 47 tahun 1973 tentang penertiban perjudian dan UU No. 7 Tahun 1974 . Dalam UU No. 7 tahun 1974 dijelaskan bahwa ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataan juga menunjukkan bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah baik pusat maupun daerah dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, eksese negatifnya lebih besar daripada eksese positifnya. Pemerintah pada akhirnya membuat beberapa kebijakan untuk mencegah aliran dana dari dalam negeri ke luar negeri, sekaligus menggalang dana untuk kepentingan sosial.

Tulisan ini mengkaji tentang kebijakan pemerintah tentang sumbangan berhadiah untuk mengatasi permasalahan terkait banyaknya aliran dana akibat dari aktivitas perjudian yang mengakibatkan sebagian

masyarakat di Indonesia membelanjakan uangnya untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut.

Keberadaan SSB hingga SDSB yang tujuan awalnya untuk mengumpulkan dana sosial justru membawa akses negatif yang sangat besar. Dimulai dari kebijakan awal SSB tahun 1979 merupakan periode awal berkembangnya lotere YDBKS ketika pemerintah berupaya meminimalisir lotere ilegal yang marak di beberapa daerah. Lotere tersebut mampu bertahan hingga dikeluarkan kebijakan tentang Porkas di tahun 1985. Tidak ada resistensi dari masyarakat yang sangat mengancam keberadaan lotere tersebut. Periode selanjutnya menjadi klimaks dari keberadaan lotere legal, ketika mulai terlihat dampak negatifnya terutama saat Porkas beralih wajah menjadi KSOB di tahun 1988. Banyak opini kontra mengkritisi keberadaan lotere tersebut. Periode antiklimaks terjadi ketika TSSB dan KSOB bertransformasi menjadi SDSB. Perlawanan masyarakat semakin keras menentang keberadaan lotere tersebut hingga akhirnya pemerintah membekukannya di akhir tahun 1993.

Semua lotere tersebut disetujui oleh pemerintah provinsi ini untuk diselenggarakan sebagai bentuk kebijakan paket yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan berlaku secara nasional, tidak ada kewenangan pemerintah daerah untuk menolaknya. Selain itu, adanya kepentingan tertentu di kalangan elit lokal, baik berlatar institusional maupun personal ditengarai menjadi salah satu faktor diterimanya lotere tersebut terutama di provinsi DIY. Masyarakat mau menerima keempat lotere tersebut karena mendapat sosialisasi pemerintah tentang penggalangan dana melalui sumbangan berhadiah dan bukan merupakan judi. Bagi golongan masyarakat miskin beranggapan bahwa lotere tersebut merupakan solusi atas permasalahan ekonomi yang dihadapi.

Dengan demikian, manfaat dari kegiatan judi sungguh tidak berarti jika dibandingkan dengan bahaya kemudharatannya. Berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang untuk mencari keuntungan yang belum jelas dengan melepaskan sesuatu yang sudah pasti dimiliki karena mengharapkan sesuatu yang belum tentu pasti bisa diraih. Ini berarti bahwa judi pada dasarnya mendorong seseorang untuk menempuh jalan pintas dalam meraih kesuksesan dalam hidup. Hal ini menunjukkan bahwa penjudi tidak akan mempunyai wawasan berpikir yang jauh, sehingga lemah akalnya, dan bila harta bendanya telah habis karena judi, maka terpaksa hidup dalam kehinaan dan kemelaratan.

#### Saran

Setelah sekian lama model undian berhadiah muncul hingga pasca dihapusnya SDSB oleh pemerintah, timbul



beberapa masalah terkait perjudian. Penyelenggaraan judi ilegal semakin marak. Salah satunya adalah kasino yang terletak di Pluit, Jakarta. Bandar judi ini mengadakan judi dengan nominal ratusan juta sebagai taruhan. Bandar tersebut tidak takut walau harus bertentangan dengan undang - undang antisubversif No. 135/1965 karena menyelenggarakan perjudian ilegal. Fenomena perjudian ilegal juga marak di beberapa provinsi di Indonesia. Perjudian ilegal yang banyak dijumpai adalah bentuk kupon putihan serta judi kartu. Judi tersebut marak dan berkembang sebagai bentuk kerinduan masyarakat setelah ditutupnya SDSB. Sebagian judi kupon putihan juga tumbuh dari embrio semasa berlangsungnya SDSB. Judi kupon putihan kemudian berkembang dan dikenal dengan nama Toto Gelap atau lebih dikenal dengan sebutan Togel dan juga Lotere Singapura. Sungguh ironis, penutupan SDSB justru menimbulkan masalah baru yang harus diselesaikan oleh segenap aparaturnegara.

Jadi pada dasarnya di perlukan sebuah kesadaran dari berbagai lapisan masyarakat untuk menyelesaikan masalah perjudian di Indonesia. Masalahnya mentalitas masyarakat seakan – akan sudah tergiring untuk menikmati kesejahteraan melalui cara praktis tanpa perlu bekerja keras. Hal tersebut yang kemudian harusnya menjadi Tanggung jawab bersama bagaimana membina dan memupuk mental masyarakat tersebut. Peran serta Pemerintah melalui Menteri Agama serta organisasi – organisasi keagamaan dan sosial masyarakat hendaknya mampu untuk memperbaiki mentalitas masyarakat tersebut. Selain itu peran sekolah dalam memberikan segala pendidikan di berbagai aspek juga dapatnya menjadi benteng bagi anak – anak mulai usia dini. Perlunya ditanamkan pula nilai – nilai keagamaan serta pandangan bahwasannya judi tidak akan mensejahterahkan malah justru menyesatkan kehidupan.

#### Daftar Pustaka

- Arsip**  
Staatsblad Van Nederlandsch-Indie Tahun 1935 Nomer 526  
Undang – Undang Nomer 22 Tahun 1954  
Undang – Undang Nomer 11 Tahun 1957  
Keputusan Presiden Nomer 133 Tahun 1965  
Undang – Undang Nomer 7 tahun 1974  
Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1981  
Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomer: BSS-10-12/85  
Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomer: B.A. 5-4-76/169  
Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomer: BSS 16 - 11 / 88  
Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 21/BSS/XII/1988
- Surat Keputusan Menteri Sosial Nomer 673/HUK-UND/2003  
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer: 295 / KPTS / 1988
- Surat Kabar**  
Bernas, 24 Maret 1986  
Bernas, 26 Maret 1986, Yohanes Sumadya Wijaya. *"Porkas dan Forecasting"*  
Bernas, 10 Desember 1991  
Bernas, 20 Desember 1991  
Kedaulatan Rakyat, 27 Maret 1986  
Kedaulatan Rakyat, 22 Juli 1986  
Kedaulatan Rakyat, 11 Agustus 1987  
Kedaulatan Rakyat. 8 September 1987, Sunardian Wirodono, *"Selamat Panjang Umur Porkas"*  
Kedaulatan Rakyat, 9 Januari 1988  
Kedaulatan Rakyat, 10 Juli 1988  
Kedaulatan Rakyat, 8 November 1989  
Kedaulatan Rakyat, 11 Desember 1991  
Kedaulatan Rakyat, 31 Desember 1991  
Kompas, 28 Desember 1985. *"Hari ini KBPS resmi beredar"*  
Kompas, 19 Januari 1986. *"Perjudian itu kenyataan yang gaib"*  
Kompas, 13 Juli 1988  
Pos Kota, 20 Januari 1986  
Suara Merdeka. 19 Januari 2004  
Tempo, 11 Januari 1986. *"Dana Lotre buat KONI"*  
Tempo, 11 Januari 1986. *"Bagaimana Cara Memenangkan Undian Porkas?"*  
Tempo, 20 Juni 1987. Yusroni Hendridewanto, *"Porkas : Dana, Dukun & Duka"*  
Tempo, 28 November 1987. *"Menebak – nebak izin Porkas"*  
Tempo, 28 November 1987. *"Ia tetap tegar dan diam"*  
Tempo, 28 November 1987. *"Musibah Fachrurazy"*  
Tempo, 28 November 1987. *"Pak, Menang Porkas juga susah"*  
Tempo, 9 Juli 1988. Amran Nasution. *"Desa Desa Mati Karena Angan – Angan"*  
Tempo, 15 Juli 1988  
Tempo, 7 Januari 1989. Amran Nasution, *"Mengejar Buntut"*  
Tempo, 3 Juni 1989. Happy S., *"Merongrong SDSB, Merongrong Pemerintah"*  
Tempo, 24 Agustus 1991. Yopie Hidayat, *"Orang Miskin Pecandu SDSB"*  
Tempo, 20 November 1993. Budiman S. Hartoyo, *"Wajah Lotere Silih Berganti"*  
Tempo, 20 November 1993. Putut trihusodo, *"Dana Buat Siapa"*.

- Tempo, 20 November 1993. Ahmed K Soerawidjaja, "Tinggal Menunggu Kata Akhir"
- Tempo, 4 Desember 1994. "Akhir Tunjangan Rabu Malam"
- Tempo, 12 Januari 2004. "Dari Lotere Ke Lotere"

#### Buku

- Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: UNESA Unipress
- B. Simandjuntak. 1990 . *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Denny J.A., 1989. *Menegakkan Demokrasi : Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda mengenai Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Studi Indonesia
- Franz Magnis Suseno. 1998. *Mencari Makna Kebangsaan*. Yogyakarta: Kanisius
- Kartono, Kartini. 1983. *Patologi Sosial*. Edisi Terbaru. Jakarta: CV Rajawali.
- K.H., Ramadhan. 1995. *Pers Bertanya "Bang Ali Menjawab"*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya
- \_\_\_\_\_. 2012. *Ali Sadikin:Membenahi Jakarta Menjadi Kota Manusiawi*. Jakarta: PT. Ufuk Publishing House.
- Mahmud Mulyadi. 2008. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mudjijono. 2004. *Judi Buntut, Mengapa Selalu Ada?*. Yogyakarta: Tri de
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Sadjijiono. 1998. *Seri Hukum Kepolisian, Polri dan Good Governace*, (Jakarta: Laksbang Mediatama.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cetak ulang. Bogor: Politeia.
- Sugandhi, R. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sunardian Wirodono. 1994. *Gerakan Politik Indonesia : catatan 1993*. Jakarta : Puspa Swara

